

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan yang berkualitas erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sebab didalam kurikulum mengandung tujuan, perumusan rencana proses pembelajaran, serta penilaian-penilaian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pendidikan itu sendiri. Kurikulum diartikan sebagai sistem yang terencana dalam mengatur isi dan bahan pengajaran sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya kurikulum senantiasa mengalami perkembangan dalam memenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Di Indonesia telah tercatat sebanyak sepuluh kali perkembangan kurikulum dan saat ini menerapkan kurikulum 2013.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia



(Sumber: Kemendikbud)

Pengembangan kurikulum dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan akibat adanya perubahan dalam masyarakat. Menurut Direktorat Menengah Umum Depdiknas (dalam Kunandar, 2007, hlm. 17) penyempurnaan pendidikan menitikberatkan pada.

- 1). Pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan;
- 2). Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun;
- 3). Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi;
- 4). Penyelenggaraan sistem pendidikan yang

terbuka; 5). Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan; 6). Penyediaan sarana belajar yang memadai; 7). Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan; 8). Pemberdayaan peran masyarakat; 9). Pengawasan, evaluasi dan akreditasi pendidikan.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan saat ini yaitu pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengarahkan pengembangan kurikulum pada pendidikan abad 21 meliputi keterampilan abad 21, penggunaan pendekatan saintifik, dan penerapan penilaian autentik. Adanya kebijakan tersebut menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran berlandaskan keterampilan abad 21 yang biasa disebut 4C (*Critical thinking dan problem solving, Creative and innovation, Collaboration, and Communication*). Setiap aspek pada keterampilan abad 21 berkaitan dengan pemenuhan kecakapan hidup, karena sejatinya setiap manusia harus dapat menjadi manusia seutuhnya (sikap) serta hidup sejahtera (pengetahuan dan keterampilan).

Pendidikan sebagai proses dapat dilakukan untuk memperoleh kecakapan hidup dan memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan jaman saat ini, salah satunya keterampilan berpikir (Zubaidah, 2010). Keterampilan berpikir khususnya berpikir tingkat tinggi (kritis) dapat berguna untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan dan memecahkan masalah sehingga pada akhirnya siap menjalani kehidupan nyata. Implementasi pendidikan saat ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa dalam tiga hal, terdiri atas 1) mempersiapkan siswa agar dapat menyelesaikan masalah bahkan untuk masalah yang akan dihadapi kedepannya, 2) mempersiapkan siswa agar dapat memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan yanguntutannya masih terus berkembang, dan 3) mempersiapkan anak siswa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi (Fadel dalam Fitriyah, 2019). Dengan demikian, keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan patokan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten yaitu mampu berhadapan dengan transformasi (sosial, budaya, ekonomi, politik) serta menempatkan diri searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, sayang sekali sampai saat ini pendidikan di Indonesia dinilai belum memenuhi kualitasnya. Terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, diantaranya yaitu terkait

Nanda Alifa Fikriyah, 2020

IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI GURU MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

munculnya hasil nilai ujian nasional (UN) yang dinilai tidak memuaskan. Ujian Nasional (UN) merupakan sistem evaluasi dengan standar pendidikan nasional, sejak tahun 2016 Kemendikbud telah memberlakukan soal UN yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau *high order thinking skill (HOTS)*. Namun, baru-baru ini hasil yang ditunjukkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud mengenai hasil Ujian Nasional (UN) 2018-2019 masih belum cukup baik, berikut data-data nilai yang dapat dilihat:

Tabel 1.1
Rata-rata Nilai UN SMP 2018-2019

| <i>Jenjang</i> | <i>Tahun 2018</i> | <i>Tahun 2019</i> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| SMP | 51,84 | 52,81 |
| SMA (Bahasa) | 50,74 | 51,63 |
| SMA (IPA) | 51,76 | 53,00 |
| SMA (IPS) | 46,31 | 47,42 |
| SMK | 45,21 | 46,72 |

(Sumber: Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, 2019)

Hasilnya terlihat bahwa rata-rata ujian nasional 2018-2019 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Sayang sekali, meskipun hasil UN menunjukkan peningkatan nilai namun nilai tersebut masih belum sesuai dengan harapan.

Selain itu, ada juga data yang dari PISA (*Programme for International Student Assesment*) yang merupakan program internasional untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika dan kemampuan sains dengan tujuan mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara. PISA (2015) menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang didapatkan Indonesia dalam sains adalah 403 (ke-3 dari bawah), membaca peringkat ke 397, dan matematika mendapatkan peringkat 389. Indonesia mengikuti PISA pada tahun 2000, dan sampai saat ini Indonesia berada di 10 besar peringkat terbawah yaitu urutan 62 dari 72 negara yang terlibat.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya peserta didik dibiasakan dengan soal-soal yang menuntut untuk berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skill*) atau HOTS. Hal itu dapat dilakukan jika guru dapat melakukan perannya dengan baik, maka

guru harus senantiasa dibina dalam mengimplementasikan kurikulum. Dalam pembelajaran peran guru menjadi sangat penting dalam mencerdaskan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi HOTS. Guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran di sekolah sudah semestinya meningkatkan profesionalitasnya dan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini. Sesuai dengan amanah Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 mengenai pembinaan serta pengembangan profesi guru yang merupakan implementasi profesi pendidik melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dirjen GTK (2019, hlm. iii) mengemukakan bahwa “Program PKB dahulu dikembangkan oleh Dirjen GTK didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk meningkatkan kompetensi guru pada ranah pedagogik dan professional”. Pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan lebih optimal jika memaksimalkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan memfasilitasi dan melakukan pemerataan di setiap daerah, sehingga guru dapat berkolaborasi dalam mengembangkan diri. Guru juga dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan diklat dan *workshop* yang berkaitan dengan pengembangan proses pembelajaran (Fitriyah, 2019).

Menurut Dudung (2014, hlm. 21) dalam penelitiannya, hasil Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yang dilaksanakan bagi guru-guru di Jakarta Timur yaitu “Memiliki kemampuan untuk membuat dan menulis sebuah karya ilmiah, jurnal, makalah, dan proposal penelitian tindakan kelas.” Dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa guru-guru yang mengikuti program PKB dapat meningkatkan keterampilan menulisnya sebagai bahan untuk mempersiapkan kenaikan pangkatnya. Tetapi, tercantum dalam rekomendasi menjelaskan perlu adanya bimbingan berkelanjutan dengan bentuk pembimbingan terstruktur. Guru-guru memerlukan pembinaan dalam mengembangkan keterampilannya serta memecahkan permasalahan yang dialaminya.

Tercatat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainnudin mengenai pelaksanaan program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) terhadap peningkatan kemampuan penguasaan materi guru yaitu terjadi peningkatan jika

PKB diimplementasikan berkelanjutan. Hasil yang didapatkan setelah melakukan 2 siklus ditunjukkan sebagai berikut: (1). Pra siklus dengan nilai 70,79/Kurang; (2) Siklus 1 dengan nilai 78,36 /Cukup; dan (3) Siklus 2 dengan nilai 83,86/Baik (Zainudin, 2018, hlm. 48). Walau dinilai sudah cukup baik, penelitian yang telah dilakukan merekomendasikan bahwa perlunya pemenuhan mutu pendidikan serta senantiasa belajar dalam mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kualitas.

Berdasarkan penjelesan diatas, ternyata program PKB masih perlu dipertimbangkan kembali terutama pada kebutuhan guru dalam mencapai kualitas terbaik. Maka pada akhirnya memerlukan pelaksanaan PKB yang bermuara pada hasil peserta didik. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu melalui kebijakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) dibawah naungan Kemendikbud yang melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi pada tahun 2019. Program PKB melalui PKP ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mendampingi guru agar dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian (evaluasi) pembelajaran beorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain keterampilan berpikir tingkat tinggi, program PKP juga mengupayakan adanya perkembangan dalam Penumbuhan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan 4C (*creative thinking, creative, collabotive, communication*).

Program PKP sebagai lanjutan dan bagian dari PKB dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi guru dalam rangka mengejar pemerataan dan perkembangan mutu pendidikan. Program PKP berbasis zonasi mengedepankan keunikan kualitas pendidikan di sekolah seperti akreditasi, nilai UKG, dan hasil belajar (Dirjen GTK, 2019). Selain itu, guru yang terlibat dalam kelompok kerjanya masing-masing akan lebih mudah berkoordinasi dan melaksanakan PKP, melakukan evaluasi internal sampai pada pelaporan. Gagasan ini juga pada akhirnya akan dapat menunjukkan permasalahan daerah masing-masing, mencari dan berbagi solusi tepat sasaran.

Pelaksanaan program PKP terdiri dari dua kegiatan yaitu IN (*In service*) dan ON (*On Training*). Dalam sebuah pendidikan dan pelatihan kegiatan IN sama

dengan istilah pembelajaran dan ON diartikan sama dengan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan IN guru difasilitasi untuk memahami secara keseluruhan mengenai kebijakan dan materi yang disampaikan, sedangkan pada kegiatan ON guru melakukan dua kegiatan evaluasi yaitu pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan praktik pembelajaran. Kegiatan dalam menilai hasil program mengacu pada standar isi dan proses pembelajaran kurikulum 2013.

Manfaat program PKP berbasis zonasi yaitu (1) guru senantiasa menerapkan pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian, (2) peserta didik dapat meningkatkan kompetensinya dalam berpikir tingkat tinggi, (3) menjadi arahan pelaksanaan supervisi akademik bagi para pemangku kebijakan sekolah, dan (4) menjadi pedoman bagi pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik dan manajerial yang ada di sekolah (Dirjen GTK, 2019).

Adapun, kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan dengan memperhatikan materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Peran guru sebagai fasilitator lebih diutamakan dalam menstimulasi siswa dalam keterampilan berpikir kritis, khususnya untuk menghasilkan gagasan dan ide. Seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dan siswa biasanya dihadapkan pada sebuah informasi tertentu (fakta) agar dapat memahami berbagai fenomena untuk membuat suatu kesimpulan, sebab informasi akan menjadi pengetahuan setelah dilakukan analisa, diterapkan, atau diintegrasikan dalam kehidupan seperti mengambil suatu keputusan atau memecahkan masalah. Suwandi (2018) mengemukakan bahwa guru-guru masih belum memberikan pelayanan pembelajaran yang seharusnya didapatkan oleh peserta didik, diyakini bahwa sebagian besar pengalaman belajar dan latihan yang diberikan guru kurang dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak, membaca, menulis dan berbicara, padahal keempat hal tersebut merupakan keterampilan dasar dalam berpikir tingkat tinggi yang banyak dipelajari melalui pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebuah tantangan bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, guru perlu mengikuti diklat yang mengutamakan

pengembangan kompetensi pedagogik guru yakni memahami karakteristik siswa, memiliki dan menerapkan konsep pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Dengan diarahkannya Program PKP berbasis zonasi berorientasi HOTS pada kebutuhan dan permasalahan saat ini, maka sudah seharusnya program ini diharapkan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta dapat memberikan dampak nyata terhadap pendidikan di Indonesia. Orientasi hasil dapat terlihat dari nilai-nilai yang dihasilkan dalam persaingan dengan negara-negara asing pada tahun berikutnya melalui PISA, sedangkan dalam jangka dekat yaitu berkembangnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran HOTS serta hasil belajar peserta didik di kelas.

Untuk program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kota Bandung terdapat 13 pusat belajar (zonasi) yang masing-masing pusat belajar diikuti oleh 10-20 orang guru. Pada setiap pusat belajar terdapat juga satu orang fasilitator atau yang biasa disebut Guru Inti/GI, dipilih berdasarkan kualitas dan kompetensinya sebagai guru yaitu memiliki skor Ujian Kompetensi Guru/UKG lebih dari 75 dan modul yang baik ($KCM \leq 2$). Adanya pembagian dan pengelolaan seperti itu akan memudahkan penyelenggaraan program PKP berbasis zonasi.

Dengan demikian, program PKP berbasis zonasi berorientasi HOTS dinilai sebagai gagasan baru dalam pelatihan guru, maka peneliti tertarik untuk melihat gambaran dan informasi mengenai implementasi program PKP berbasis zonasi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti bermaksud melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi. Sehingga, peneliti membuat penelitian dengan judul “Implementasi Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung?
- 2) Bagaimana pelaksanaan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung?
- 3) Bagaimana evaluasi program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung?
- 4) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran dan informasi yang jelas terkait Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kota Bandung.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran dan informasi yang jelas terkait implementasi program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kota Bandung melalui penelusuran perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta, faktor pendukung dan faktor penghambat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini terdiri dari beberapa tujuan yaitu.

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung.
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung.
- 4) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian yang diharapkan dibagi atas dua bagian yaitu manfaat praktis dan teoritis, sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu dan wawasan teknologi pendidikan pada bidang pengembangan kurikulum khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan hasil belajar pada program pendidikan dan pelatihan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut.

- 1) Bagi Pemangku Kebijakan
Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan pada program berikutnya.
- 2) Bagi Sekolah
Dapat menjadi gambaran sekolah dalam memonitoring dan mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan program di sekolah masing-masing.
- 3) Bagi Guru

Dapat memotivasi dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengevaluasi pencapaian kompetensi pembelajaran yang telah berjalan.

4) Bagi Peserta Didik

Dapat mengetahui perkembangan dan kebijakan pendidikan saat ini sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan mutu pendidikan.

5) Dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti diklat, khususnya program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan bagian dari sistematika penulisan skripsi sesuai dengan Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) (2019, hlm. 15-36). Penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Diawali bab I (satu) *pendahuluan*, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II (dua) *kajian pustaka* terkait permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu menjadi landasan dan pedoman berpikir dalam proses pemecahan rumusan masalah. Kajian pustaka berisikan teori-teori mengenai Implementasi Program, Pendidikan dan Pelatihan, serta Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi.

Bab III (tiga) *metode penelitian* yang digunakan dalam penelitian, bab ini mencakup pendekatan penelitian, metode dan desain penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian

Bab IV (empat) *temuan dan pembahasan penelitian*, memuat hasil penelitian, deskripsi hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan hasil penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Bab V (lima) *simpulan, implikasi dan rekomendasi* mengenai penelitian yang telah dilakukan. Pada Bab ini penulis menyampaikan poin-poin penting penelitian, manfaat atau dampak penelitian serta memberikan masukan pada subjek penelitian maupun peneliti selanjutnya. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.